

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut kehidupan orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMK juga merupakan bagian kelompok perekonomian terbesar dalam perekonomian yang ada di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca terjadinya krisis. Kegiatan Usaha Mikro Kecil (Salam et al.,2022) (UMK) menjadi salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam permasalahan perekonomian nasional. UMK diharapkan mampu menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif, serta UMK merupakan unit usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, maupun penggunaan modal usaha yang relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung cukup sederhana. (Atmoko et al., 2012)

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam mengembangkan potensi para pelaku UMK, melalui program yang diadakan pemerintah dalam bentuk uang dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah, khususnya Kota Jambi. Peran pemerintah adalah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMK dalam mengembangkan usahanya. (Ilmu et al., 2020),

Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha agar tetap kondusif sehingga usaha mikro kecil itu sendiri dapat berkembang. Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat tiga bidang utama, yaitu Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan usaha mikro, kecil, menengah. Bidang yang menjadi fokus utama pada permasalahan ini yaitu pada Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan sektor umkm.

Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan sektor UMKM memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan kota, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang usaha mikro, kecil, menengah skala kota.

2. Pembinaan yang meliputi pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang usaha mikro, kecil, menengah skala kota.

Dikutip dari CNN Indonesia, sejauh ini di Indonesia perkembangan terakhir per Juni 2022, sudah mencapai 59,2 juta pelaku UMKM. Dengan begitu UMK berada diposisi sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi rakyat, namun masih ditemukan adanya permasalahan terhadap pelaku usaha mikro kecil tentang perputaran modal dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan usaha mikro, Karena tingginya tingkat kegagalan UMK dalam mengembangkan bisnisnya maka dari itu pemerintah bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi memberikan bantuan produktif usaha mikro bagi para pelaku UMK agar terhindar dari kebangkrutan.

Serta diharapkan setiap peserta yang mendapatkan bantuan produktif usaha mikro mampu untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan awal pemerintah yaitu untuk menolong para pelaku usaha mikro dari keterpurukan ekonomi. seperti pada tahun 2020 seluruh dunia bahkan Indonesia terpapar wabah virus Covid-19 yang berasal dari China. Hal ini menyebabkan sektor UMKM mengalami penurunan drastis disektor permintaan barang yang akhirnya berpengaruh kepada penghasilan pelaku usaha mikro maupun kondisi perekonomian Indonesia.

Melihat dari kondisi tersebut, pemerintah mengambil Tindakan untuk memberikan program bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang disebut dengan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) merupakan program bantuan hibahan modal untuk yang sebelumnya belum mendapatkan pinjaman modal dari Bank yang dikenal dengan istilah BLT UMKM (Bantuan Langsung Tunai) yang diatur dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil mikro RI No.6 Tahun 2020. Menurut Sukarno dalam Sarwanti, Budi & Wulan (2017) faktor yang pertama adalah jumlah modal, karena modal merupakan pengeluaran usaha untuk membeli bahan baku modal dan perlengkapan-perengkapan produksi dengan tujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang yang tersedia dalam perekonomian.

Hal ini tentu harus diperhatikan oleh para pelaku usaha mikro agar memperhatikan jumlah modal yang digunakan sebagai usaha, karena dengan memenuhi kebutuhan untuk jumlah modalnya maka dapat meningkatkan tingkat keuntungan usaha mikro tersebut. Menurut Haryanto dan Dewi (2019) faktor modal merupakan sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam suatu industri usaha, dan ini merupakan penyebab yang sering membuat suatu unit usaha tersebut tersendat atau bahkan sampai gulung tikar.

Hal ini sering terjadi khususnya bagi kalangan usaha mikro yang termasuk dalam golongan UMKM. Dikarenakan adanya antusiasme masyarakat pelaku usaha menengah kecil dan mikro yang tinggi serta keseriusan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM, maka pemerintah mengalokasikan Rp 36,02 Triliun untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dilanjutkan hingga tahun 2021 sebagai program prioritas pemerintah pada tahun 2021. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Alam Barajo, dalam pengumpulan data usaha mikro tersebut dengan cara langsung datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Untuk tatacara penyaluran bantuan produktif usaha mikro menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang tatacara penyaluran BPUM adalah yang pertama, pengusulan calon penerima, lalu validasi data calon penerima bantuan, penetapan penerima bantuan, pencairan dana BPUM, lalu laporan penyaluran bantuan. (*BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, n.d.) Melalui program tersebut diharapkan pelaku usaha mikro akan terbantu sehingga tidak ada lagi kesulitan akan modal usaha maupun pembelian bahan baku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fenomena yang ditemukan dilapangan bahwa nyaris kebanyakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Alam Barajo mengalami kendala dalam melakukan perputaran modal yang menyebabkan mengalami kebangkrutan usaha, karena kemungkinan faktor Kecamatan Alam Barajo merupakan bagian pinggiran dari Kota Jambi barangkali aktivitas bisnisnya tidak terlalu aktif atau sama produktifnya dengan kecamatan maupun daerah bagian kota, ini menjadi alasan bagi pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM terkhususnya untuk Kota Jambi karena cakupan dari penelitian ini adalah Kecamatan Alam Barajo, untuk menyelenggarakan bantuan produktif usaha mikro untuk peningkatan produktivitas usaha mikro dan menjangir seluruh pelaku usaha mikro agar dana yang dialokasikan tersebut dapat terealisasikan secara merata dan menyeluruh. Kecamatan Alam Barajo mempunyai fasilitas umum yaitu terminal angkot, seharusnya ini merupakan lokasi startegis untuk tempat pelaku usaha mikro melakukan kegiatan bisnis, tetapi rawannya kebangkrutan akan terjadi apabila pelaku usaha mikro tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk perputaran modal usaha selanjutnya, inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi untuk bisa membantu secara merata bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan agar usahanya bisa tetap beroperasi ditengah kebutuhan akan perputaran modal, pembelian bahan baku usaha dan kebutuhan untuk keperluan sehari-hari.

Dari program tersebut, muncul pertanyaan apakah BPUM efektif dalam membantu produktivitas pelaku usaha mikro. Penelitian ini mengambil program BPUM, yang menjadi objeknya adalah masyarakat penerima bantuan program. Alasan yang mendasari peneliti mengambil subjek program BPUM adalah karena belum banyaknya penelitian yang mengangkat tema tentang pengaruh program bantuan pemerintah kepada masyarakat pelaku usaha kecil mikro yang menerima bantuan pemerintah tersebut. Pada penelitian sebelumnya, menurut (Abdul Majid, 2021) berkesimpulan bahwa program bantuan produktif usaha mikro yang direalisasikan pemerintah untuk pelaku usaha mikro berdampak positif dan memberikan pengaruh yang signifikan untuk memulai Kembali menjalankan usaha mikro akibat dampak dari keterpurukan ekonomi akibat virus corona.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya *act of research* untuk bisa memecahkan persoalan tentang pengaruh program bantuan produktif usaha mikro terhadap peningkatan usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Alam Barajo dan menciptakan sudut pandang baru tentang permasalahan UMK. Berikut merupakan data awal yang diperoleh peneliti berdasarkan pengisian kuisioner online yang dibagikan melalui link tentang jenis bantuan pemerintah yang diterima pelaku usaha mikro di Kecamatan Alam Barajo:

Tabel 1.1  
Data Jenis Bantuan yang Diterima Pelaku Usaha Mikro  
di Kecamatan Alam Barajo

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha	Kelurahan	RT	Jenis Bantuan Pemerintah yang diterima	Apakah bantuan tersebut efektif	
						Ya	Tidak
1.	Tara Oktavianti	Humaira Store	Bagan Pete	02	BPUM	✓	
2.	Iskandar Ismail	Kantin Bude	Bagan Pete	01	BPUM	✓	
3.	Eni Mahmudah	Baju BJ Eni	Bagan Pete	03	BPUM	✓	
4.	Rastuti	Warung Ibu Mutiara	Bagan Pete	04	BPUM	✓	
5.	Desi Yospida	Putri Tunggal Shop	Bagan Pete	03	BPUM	✓	
6.	July	Warung ferdi Feli	Bagan Pete	01	BPUM	✓	
7.	Puspitasari	Warung Dhea	Bagan Pete	05	BPUM	✓	
8.	Gusnatri	Toko Aiziya	Bagan Pete	04	BPUM	✓	

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha	Kelurahan	RT	Jenis Bantuan Pemerintah yang diterima	Apakah bantuan tersebut efektif	
						Ya	Tidak
9	Alson Sihaloho	Toko Sayur Alson	Bagan Pete	12	BPUM	✓	
10.	Fitriyani	Rangga Zira sosis Pempek	Kenali Besar	17	BPUM	✓	
11.	Dwi Surachman	Warung Ikbal	Bagan Pete	03	BPUM	✓	
12.	Ainun Safira	Hakku Florist	Kenali Besar	07	BPUM	✓	
13.	Ratna Watyla	HK. Hidroponik	Beliung	15	BPUM	✓	
14.	Gusli	Toko Gusli	Rawasari	09	BPUM	✓	
15.	Masri	Arda Tailor	Rawasari	04	BPUM	✓	

*Sumber: berdasarkan data peneliti melalui kuisioner*

Bentuk usaha mikro ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria. Berdasarkan pengisian kuisioner yang dibagikan kepada 60 orang yang terdata dalam Kecamatan Alam Barajo, terdapat 15 responden yang ditemukan. Dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas bahwa semua responden setuju akan program bantuan pemerintah produktif usaha mikro memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktivitas pelaku usaha mikro. Dan dapat dilihat pula bahwa dari 15 responden yang tercatat, seluruhnya setuju bahwa bantuan pemerintah tersebut berjalan efektif untuk pemberdayaan usaha mikro. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan dengan judul **“Pengaruh Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro di Kecamatan Alam Barajo”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh program bantuan produktif usaha mikro terhadap peningkatan produktivitas Usaha Mikro di Kecamatan Alam Barajo
2. seberapa besar pengaruh program bantuan produktif usaha mikro tersebut terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro di Kecamatan Alam Barajo.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data dalam mengetahui pengaruh program bantuan produktif usaha mikro terhadap peningkatan produktivitas para pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Alam Barajo, serta berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Ada atau tidaknya pengaruh program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) I terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro di Kecamatan Alam Barajo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan bantuan produktif usaha mikro terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro di Kecamatan Alam Barajo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah materi mengenai penggunaan program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas usaha khususnya di Kecamatan Alam Barajo.

#### **B. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Dapat memberikan gambaran serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh program bantuan produktif usaha kecil yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Alam Barajo.

##### **2. Bagi Usaha Kecil Mikro**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pelaku usaha mikro mengenai penggunaan program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) terhadap usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas usaha setelah dilakukannya sebuah riset dan penelitian.